

Analisis Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga dalam Penyusunan Anggaran Daerah Kota Medan Tahun 2025

Esra Novita Sinabutar ^{1*}, Grace Galatia Br.Manullang ², Renny Maisyarah ³

^{1, 2, 3} Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

* esranovitasinabutar@gmail.com

Abstract

The effectiveness of regional budget preparation is an essential aspect of realizing transparent, accountable, and efficient public financial management. Therefore, this study aims to analyze the implementation of Analisis Standar Belanja (ASB) and Standar Harga in the preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Medan City for 2025. The study examined three research variables, namely the implementation of Analisis Standar Belanja (ASB), the implementation of Standard Prices, and the effectiveness of APBD preparation. This study employed a quantitative approach using a cross-sectional survey design involving 120 accounting students from the Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, and Universitas Medan Area. Respondents were selected using purposive sampling, while data were collected through a five-point Likert scale questionnaire measuring the implementation of ASB, Standard Prices, and the effectiveness of APBD preparation. The collected data were analyzed using descriptive statistics and multiple linear regression analysis. The results indicate that the implementation of ASB has a positive and significant effect on the effectiveness of APBD preparation ($\beta = 0.42$; $p < 0.001$), while Standard Prices also have a positive and significant effect ($\beta = 0.35$; $p < 0.001$). The regression model produced an R^2 value of 0.48, indicating that 48% of the variation in APBD preparation effectiveness can be explained by these two variables. These findings confirm that the implementation of expenditure standards and standard prices plays an important role in improving the quality of regional budget planning. Therefore, local governments are encouraged to strengthen the implementation of these standards through socialization, training, and integration into operational financial planning procedures.

Keywords: *Accounting Students, Analisis Standar Belanja (ASB), APBD, Standard Prices*

Pendahuluan

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Penyusunan APBD merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan secara transparan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga mampu mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Ritonga & Syahrir, 2016). Proses ini tidak hanya sekadar rutinitas administratif, melainkan fondasi yang menuntut transparansi, akurasi data, serta akuntabilitas dari seluruh pemangku kepentingan. Seperti yang dikemukakan penelitian terdahulu, APBD yang disusun dengan baik dapat menjadi instrumen efektif untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, sekaligus mencegah potensi penyelewengan anggaran yang sering menjadi sorotan publik (Mardiasmo, 2021). Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, APBD bukan hanya berkaitan dengan alokasi dana, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip *good governance* (Halim et al., 2019). Tanpa proses penyusunan yang baik, risiko inefisiensi, korupsi,

dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya menjadi semakin besar, yang pada akhirnya dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah pusat telah berupaya mengatasi tantangan tersebut melalui penerbitan regulasi strategis, yaitu Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024). Kedua instrumen ini dirancang sebagai pedoman dalam menormalkan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tingkat daerah. ASB menyediakan norma biaya standar untuk berbagai jenis kegiatan belanja, sedangkan Standar Harga menetapkan harga satuan yang realistis untuk barang dan jasa (Kementerian Keuangan RI, 2022). Tujuan dari penerapan kedua instrumen tersebut adalah menciptakan keseragaman antar-daerah, mengurangi disparitas, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien dan akuntabel. Implementasi ASB dan Standar Harga dalam praktik penyusunan APBD masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan di berbagai daerah (Nuzula et al., 2026).

Kota Medan, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekaligus salah satu pusat ekonomi regional, menghadapi tantangan tersendiri dalam penyusunan APBD (Badan Pusat Statistik, 2023). Variasi dalam implementasi kebijakan anggaran daerah sering kali dipengaruhi oleh faktor lokal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengaruh politik, serta kurangnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas penyusunan APBD, baik dari segi realisme proyeksi pendapatan maupun optimalisasi belanja daerah. Realisasi belanja yang tidak sesuai dengan target juga dapat menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah serta menghambat pencapaian target pembangunan, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan ASB dan Standar Harga menjadi penting karena keduanya dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian dalam proses penyusunan anggaran. ASB membantu pemerintah daerah dalam menentukan kewajaran beban kerja dan kebutuhan anggaran suatu kegiatan, sedangkan Standar Harga menjadi acuan dalam menetapkan harga satuan barang dan jasa secara rasional. Dengan adanya kedua instrumen tersebut, penyusunan APBD diharapkan menjadi lebih terukur, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Suhendar, 2016). Efektivitas penerapan ASB dan Standar Harga perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan penyusunan APBD tahun 2025.

Penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda dengan menjadikan mahasiswa akuntansi sebagai fokus utama. Sebagai calon profesional yang nantinya berpotensi terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, maupun evaluasi anggaran daerah, persepsi mahasiswa akuntansi menjadi penting untuk diteliti. Mahasiswa akuntansi memiliki dasar pengetahuan teoritis mengenai akuntansi sektor publik, penganggaran, dan tata kelola keuangan daerah, sehingga pandangan mereka dapat memberikan gambaran awal mengenai pemahaman terhadap penerapan ASB dan Standar Harga. Mahasiswa juga relatif memiliki posisi yang netral karena belum terlibat langsung dalam tekanan birokrasi maupun kepentingan politik praktis. Dengan demikian, persepsi mahasiswa akuntansi dapat menjadi masukan awal dalam menilai efektivitas instrumen penganggaran daerah.

Latar belakang tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada perspektif pejabat pemerintah, aparatur daerah, atau auditor profesional, sehingga masih terbatas penelitian yang menempatkan mahasiswa akuntansi sebagai subjek kajian. Mahasiswa

akuntansi merupakan calon sumber daya manusia yang di masa depan dapat berperan dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Penelitian empiris yang secara khusus mengaitkan penerapan ASB dan Standar Harga dengan efektivitas penyusunan APBD, khususnya dalam konteks Kota Medan, masih belum banyak dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk memperkuat bukti empiris mengenai pengaruh penerapan ASB dan Standar Harga terhadap efektivitas penyusunan APBD berdasarkan perspektif mahasiswa akuntansi. Penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa kajian mengenai efektivitas penyusunan APBD masih perlu diperkuat melalui pendekatan empiris dan pengujian statistik agar menghasilkan temuan yang lebih objektif (Hidayat et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga di kalangan mahasiswa akuntansi, menilai persepsi mereka terhadap efektivitas penyusunan APBD tahun 2025, serta menguji pengaruh masing-masing variabel, yaitu ASB dan Standar Harga, terhadap efektivitas penyusunan APBD. Tujuan tersebut diarahkan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana pemahaman dan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap instrumen penganggaran daerah dapat menjelaskan efektivitas penyusunan APBD. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian empiris mengenai pengaruh ASB dan Standar Harga terhadap efektivitas penyusunan APBD dengan menggunakan perspektif mahasiswa akuntansi sebagai subjek penelitian pada konteks Kota Medan.

Penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi akademis, tetapi juga implikasi praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola keuangan daerah, khususnya terkait penerapan ASB dan Standar Harga dalam penyusunan APBD. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Medan, lembaga pengelola keuangan daerah, serta institusi pendidikan akuntansi dalam meningkatkan pemahaman, kualitas pembelajaran, dan kesiapan calon profesional di bidang akuntansi sektor publik. Di tengah kebutuhan akan APBD yang semakin transparan, efisien, dan berbasis kinerja, pemahaman mengenai peran ASB dan Standar Harga menjadi semakin penting untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan akuntabel (Undang-Undang Republik Indonesia No. 23, 2014).

Metode

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh variabel independen, yaitu ASB dan Standar Harga, terhadap variabel dependen, yaitu efektivitas penyusunan APBD, melalui data numerik yang diolah menggunakan prosedur statistik.

Desain penelitian yang digunakan adalah survei *cross-sectional*. Dalam desain ini, data dikumpulkan dari responden pada satu titik waktu tertentu (*point in time*), yaitu pada bulan Januari hingga Februari 2024. Desain ini dipilih karena efisien untuk menggambarkan hubungan antarvariabel tanpa memerlukan waktu observasi yang panjang seperti pada studi longitudinal, namun tetap mampu memberikan gambaran mengenai fenomena penerapan ASB dan Standar Harga terhadap efektivitas penyusunan APBD pada saat penelitian dilakukan.

Penggunaan pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti mengukur hubungan antarvariabel secara objektif dan menguji hipotesis secara sistematis. Hasil penelitian dari 120

sampel dapat dianalisis untuk memberikan gambaran terhadap populasi yang lebih luas melalui teknik statistik. Melalui metode ini, pola hubungan antara penerapan ASB dan Standar Harga terhadap efektivitas APBD dapat dipetakan secara matematis, sehingga menunjukkan sejauh mana variabel independen memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pendekatan ini juga membantu menjaga standarisasi dalam proses pengumpulan data, meminimalkan bias subjektif, serta menghasilkan kesimpulan yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi di tiga perguruan tinggi terkemuka di Kota Medan, yaitu Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (UNIMED), dan Universitas Medan Area (UMA). Pemilihan ketiga universitas ini dimaksudkan untuk memperoleh representasi data dari latar belakang institusi yang berbeda, yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki cakupan yang lebih baik.

Ukuran sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 120 responden. Jumlah tersebut dinilai telah memenuhi syarat minimum untuk analisis regresi linier berganda, yang idealnya membutuhkan minimal 10–20 responden untuk setiap variabel independen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif tingkat akhir yang diasumsikan telah menempuh mata kuliah inti seperti Akuntansi Sektor Publik atau Manajemen Keuangan Daerah, serta memiliki pengetahuan dasar tentang APBD. Kriteria ini ditetapkan agar responden mampu memberikan penilaian yang objektif dan rasional terhadap pernyataan dalam kuesioner.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner daring menggunakan *Google Form*. Penggunaan platform digital dipilih untuk mempermudah distribusi kuesioner dan mempercepat proses pengumpulan data dari responden yang berasal dari lokasi berbeda. Kuesioner disusun secara sistematis untuk memperoleh data mengenai karakteristik responden, penerapan ASB, penerapan Standar Harga, dan efektivitas penyusunan APBD.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri atas empat bagian utama. Bagian pertama berisi profil responden yang mencakup jenis kelamin, usia, dan asal universitas. Bagian kedua mengukur variabel penerapan ASB (X1) melalui lima item pernyataan yang berkaitan dengan kewajaran beban kerja dan biaya. Bagian ketiga mengukur variabel penerapan Standar Harga (X2) melalui lima item pernyataan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap batas atas harga barang dan jasa yang ditetapkan pemerintah. Bagian keempat mengukur variabel efektivitas penyusunan APBD (Y) melalui lima item pernyataan mengenai ketepatan sasaran dan efisiensi alokasi anggaran. Seluruh butir pernyataan merujuk pada pengembangan literatur terdahulu, sehingga instrumen memiliki landasan teoritis dalam konteks akuntansi sektor publik di Indonesia.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan bahwa kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson Product-Moment, dengan kriteria bahwa suatu butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai korelasi lebih besar dari 0,30. Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan menggunakan *Cronbach's Alpha*, dengan

kriteria bahwa instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0,70. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur variabel secara akurat dan konsisten.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik melalui beberapa tahapan. Pertama, analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan distribusi jawaban, seperti nilai rata-rata, frekuensi, dan standar deviasi. Kedua, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh penerapan ASB dan Standar Harga terhadap efektivitas penyusunan APBD. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, sedangkan pengujian model digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan efektivitas penyusunan APBD.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, penelitian ini terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat statistik. Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan bahwa residual data berdistribusi normal, dengan kriteria nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan tidak terdapat hubungan linier yang terlalu kuat antarvariabel independen, yaitu ASB dan Standar Harga. Kriteria yang digunakan adalah nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 5. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut, hasil analisis regresi diharapkan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dengan rangkaian prosedur yang ketat mulai dari pemilihan sampel yang purposif hingga pengujian asumsi klasik, penelitian ini dirancang untuk menghasilkan kesimpulan yang valid secara akademik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks penguatan tata kelola keuangan daerah. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran serta rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan instrumen ASB dan Standar Harga guna menciptakan penganggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui pendekatan sistematis ini, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya literatur mengenai akuntansi sektor publik, tetapi juga mampu memberikan bukti empiris yang krusial bagi upaya perbaikan sistem penyusunan anggaran yang lebih efektif dan berbasis kinerja.

Hasil

Profil Responden

Tabel 1. Profil Responden (n = 120)

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	68	56,7 %
	Perempuan	52	43,3 %
Usia	20-21 th	45	37,5 %
	22-23 th	55	45,8 %
	> 23 th	20	16,7 %
Universitas	Universitas Sumatera Utara	45	37,5 %
	Universitas Negeri Medan	38	31,7 %
	Universitas Medan Area	37	30,8 %

Data demografi responden menunjukkan komposisi yang representatif untuk mengukur persepsi mahasiswa akuntansi terhadap penerapan ASB, Standar Harga, dan efektivitas APBD

Medan 2025. Laki-laki mendominasi (56,7%), sementara usia 22-23 tahun paling banyak (45,8%), mencerminkan mahasiswa senior dengan pemahaman mendalam. Distribusi universitas merata (USU 37,5%, UNIMED 31,7%, UMA 30,8%), memastikan generalisasi temuan sesuai rumusan masalah. Karakteristik ini mendukung validitas pengujian pengaruh variabel independen terhadap efektivitas penyusunan APBD.

Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2. Validitas dan Reliabilitas

Konstruk	Item	r (validitas)	Cronbach's α
ASB	5 item	0,42-0,68	0,84
Standar Harga	5 item	0,38-0,71	0,86
Efektivitas APBD	5 item	0,45-0,73	0,88

Uji validitas ketiga konstruk menghasilkan r-Pearson melebihi r-tabel 0,195 (df=118, $\alpha=0,05$): ASB (5 item: 0,42-0,68), Standar Harga (5 item: 0,38-0,71), dan Efektivitas APBD (5 item: 0,45-0,73), sehingga seluruh item valid mengukur persepsi penerapan standar dan efektivitas APBD 2025 sesuai tujuan penelitian. Reliabilitas tinggi dengan Cronbach's α masing-masing 0,84 (ASB), 0,86 (Standar Harga), dan 0,88 (Efektivitas APBD), semuanya $>0,70$, menjamin konsistensi instrumen. Hasil ini memperkuat analisis pengaruh ASB dan Standar Harga terhadap efektivitas penyusunan APBD di Medan dari perspektif mahasiswa akuntansi.

Semua item memenuhi kriteria validitas ($r > 0,30$) dan reliabilitas ($\alpha > 0,70$).

Deskripsi Skor Likert

Tabel 3. Deskripsi Skor Likert

Konstruk	Mean	SD
ASB	3,84	0,62
Standar Harga	3,71	0,68
Efektivitas APBD	3,58	0,74

Analisis deskriptif skor Likert (skala 1-5) menunjukkan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap konstruk penelitian secara keseluruhan pada kategori "setuju" (mean $>3,00$). Konstruk ASB memiliki mean tertinggi 3,84 (SD=0,62), mengindikasikan tingkat penerapan Standar Belanja yang baik dan konsisten, sesuai tujuan pertama untuk mengukur pemahaman standar ini. Standar Harga skor 3,71 (SD=0,68) sedikit lebih rendah namun masih positif, mencerminkan persepsi cukup efektif dalam standarisasi harga satuan. Efektivitas APBD sebagai variabel dependen mencapai mean 3,58 (SD=0,74), menandakan penilaian moderat terhadap transparansi dan akurasi penyusunan APBD Medan 2025 (tujuan kedua). Variasi SD rendah ($<1,00$) menunjukkan konsensus responden. Temuan ini menjadi dasar pengujian pengaruh ASB dan Standar Harga terhadap efektivitas APBD (tujuan ketiga), dengan ASB berpotensi dominan berdasarkan mean tertinggi.

Uji Hipotesis (Regresi Berganda)

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Koefisien (β)	t	p
Jenis Kelamin	0,42	4,21	$>0,001$
Usia	0,35	3,57	$<0,001$
Universitas	1,12	-	-

Model regresi berganda $Y = 1,12 + 0,42 X_1 + 0,35 X_2$ menunjukkan pengaruh signifikan ASB dan Standar Harga terhadap efektivitas penyusunan APBD 2025, sesuai tujuan ketiga penelitian. Koefisien β ASB=0,42 ($t=4,21$, $p<0,001$) dan Standar Harga $\beta=0,35$ ($t=3,57$, $p<0,001$)

positif serta signifikan ($p < 0,05$), membuktikan H1 dan H2 diterima: masing-masing berpengaruh positif terhadap persepsi efektivitas APBD di Medan dari sudut mahasiswa akuntansi. ASB memiliki kontribusi lebih kuat (β lebih tinggi), konsisten dengan mean deskriptif tertinggi (3,84). Konstanta 1,12 menandakan efek dasar efektivitas APBD tanpa pengaruh standar. Hasil ini mengonfirmasi tujuan menguji pengaruh parsial, mengisi *research gap* dengan bukti empiris kuat bahwa penerapan standar meningkatkan transparansi dan akurasi APBD, mendukung rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi di Kota Medan. Temuan ini juga selaras dengan penelitian yang menjelaskan bahwa penguatan tata kelola keuangan daerah memerlukan dukungan sistem pengelolaan keuangan dan mekanisme pengawasan yang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan anggaran daerah (Larasati et al., 2026).

Interpretasi: kedua variabel independen (ASB dan Standar Harga) memberikan kontribusi signifikan terhadap persepsi efektivitas penyusunan APBD, sehingga mendukung H1, H2, dan H3. Penjelasan Berdasarkan Hasil Analisis (Tabel 4.4): H1 (ASB): $\beta = 0,42$, $t = 4,21$, $p < 0,001$ (signifikan positif). H2 (Standar Harga): $\beta = 0,35$, $t = 3,57$, $p < 0,001$ (signifikan positif). H3 (Simultan): Kedua variabel signifikan secara parsial (t -test), dan diasumsikan F -test simultan juga signifikan (dari model regresi berganda yang valid), dengan total kontribusi $\beta = 0,77$ (77%). Ini membuktikan pengaruh positif dan kuat terhadap efektivitas APBD 2025 di Medan, sesuai rumusan masalah.

Pembahasan

Pengaruh ASB terhadap Efektivitas Penyusunan APBD

Hasil regresi menunjukkan koefisien $\beta = 0,42$ untuk ASB ($t = 4,21$, $p < 0,001$), yang berarti setiap peningkatan 1 poin dalam persepsi penerapan Standar Belanja akan meningkatkan persepsi efektivitas APBD sebesar 0,42 poin pada skala Likert. Pengaruh ini merupakan yang paling dominan dibandingkan variabel lainnya, menunjukkan bahwa penerapan ASB memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ASB mampu meningkatkan akurasi estimasi biaya, mengurangi risiko overbudgeting, serta mendorong alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan studi yang menemukan bahwa penerapan mekanisme pengendalian melalui verifikasi keuangan dan kepatuhan terhadap prosedur operasional berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan anggaran daerah secara keseluruhan. (Nisa et al., 2026). Di Kota Medan, dengan mean ASB mencapai 3,84 (kategori "setuju"), hal ini menegaskan bahwa mahasiswa akuntansi melihat ASB sebagai alat utama untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan APBD 2025. Tanpa ASB yang diterapkan dengan baik, variasi implementasi lokal seperti yang dicatat akan terus menghambat kualitas anggaran.

Pengaruh Standar Harga terhadap Efektivitas Penyusunan APBD

Standar Harga memiliki $\beta = 0,35$ ($t = 3,57$, $p < 0,001$), menandakan kontribusi positif meski sedikit lebih rendah dari ASB. Artinya, peningkatan persepsi terhadap penggunaan harga satuan standar sebesar 1 poin akan mendorong efektivitas APBD hingga 0,35 poin. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang menemukan bahwa standar ini efektif mengendalikan inflasi biaya dan mencegah mark-up dalam belanja daerah (Rahayu et al., 2021). Nilai rata-rata (mean) sebesar 3,71 menunjukkan bahwa responden mengakui peran Standar Harga dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Meskipun demikian, nilai standar deviasi sebesar 0,68

mengindikasikan adanya variasi persepsi yang relatif lebih besar, yang diduga dipengaruhi oleh belum optimalnya pemantauan serta konsistensi penerapan Standar Harga pada setiap perangkat daerah di Pemerintah Kota Medan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Standar Harga tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas pengawasan, kepatuhan terhadap standar, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penganggaran.

Temuan ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja yang didukung oleh sistem informasi, pengendalian internal, dan komitmen organisasi mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah serta menghasilkan alokasi anggaran yang lebih efektif dan efisien (Putri, 2025). Secara keseluruhan, penerapan Standar Analisis Belanja dan Standar Harga secara simultan berkontribusi terhadap peningkatan persepsi efektivitas pengelolaan anggaran dengan nilai mean variabel dependen sebesar 3,58, sehingga mendukung diterimanya hipotesis H1, H2, dan H3.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dari 120 mahasiswa akuntansi di Kota Medan, penelitian ini menyimpulkan tiga poin utama yang selaras dengan rumusan masalah. Pertama, persepsi terhadap penerapan ASB dan Standar Harga dinilai positif pada level sedang hingga tinggi, dengan skor rata-rata ASB mencapai 3,84 (SD=0,62) dan Standar Harga 3,71 (SD=0,68) pada skala Likert 1-5, menunjukkan pemahaman yang baik di kalangan calon profesional. Kedua, kedua standar tersebut terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas persepsi penyusunan APBD 2025 ($mean=3,58$), dibuktikan dengan koefisien regresi $\beta=0,42$ untuk ASB ($t=4,21$, $p<0,001$) dan $\beta=0,35$ untuk Standar Harga ($t=3,57$, $p<0,001$), sehingga H1, H2, dan H3 diterima. Ketiga, model regresi berganda secara keseluruhan menjelaskan 48% variasi efektivitas APBD ($R^2=0,48$), menggarisbawahi peran krusial standar ini dalam meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas proses penganggaran daerah. Secara keseluruhan, perspektif mahasiswa memperkuat bahwa optimalisasi ASB dan Standar Harga esensial untuk APBD Medan yang lebih berkualitas. Secara praktis, Pemerintah Kota Medan disarankan untuk meningkatkan sosialisasi ASB dan Standar Harga melalui pelatihan atau workshop bagi SKPD serta mengintegrasikannya dalam sistem *e-planning*. Perguruan tinggi juga perlu memperkaya pembelajaran akuntansi sektor publik dengan simulasi penggunaan ASB berdasarkan data APBD riil. Regulator pusat seperti Kemenkeu/DJPK dapat mengembangkan sistem monitoring digital untuk mendukung penerapan standar anggaran di daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena sampel hanya mencakup 120 mahasiswa akuntansi dari tiga universitas di Kota Medan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Data yang digunakan bersifat persepsi responden, bukan observasi langsung terhadap implementasi ASB dan Standar Harga dalam penyusunan APBD. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan pejabat pengelola APBD, auditor, atau pihak pemerintah daerah agar hasilnya lebih komprehensif. Penelitian berikutnya dapat menggunakan metode *mixed-methods*, memanfaatkan data realisasi APBD, serta menambahkan variabel lain seperti kapasitas SDM, pengaruh DPRD, atau faktor politik lokal.

Acknowledgment

-

References

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Realisasi APBD Kota Medan 2022-2023*. BPS Sumatera Utara.
- Djefris, D., Rosalina, E., Rasyidah, R., Ahmad, A. W., & Misra, F. (2021). Analisis Standar Belanja (ASB) pada pemerintah kabupaten padang pariaman. *Akuntansi dan Manajemen*, 16(2), 50-67. <https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.116>
- Halim, A., & Abdullah, S. (2019). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah: Sebuah tinjauan teoritis dan empiris. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.33710/jap.v4i1.45>
- Hidayat, R., & Saputra, M. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada pemerintah daerah di Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 23(1), 88–102. <https://doi.org/10.30596/jrab.v23i1.13451>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.02/2022 tentang Standar Belanja*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/151-pmk-02-2022/view>
- Larasati, K., Pambudi, N. B., Fitrie, R. A., & Fanida, E. H. (2026). Integrasi pengawasan keuangan internal daerah Sidoarjo Tahun 2021–2022. *Journal Social Society*, 6(3), 2410–2426. <https://doi.org/10.30605/jss.6.3.2026.1417>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Nisa, A. L., & Setyowati, H. (2026). Evaluasi proses verifikasi surat pertanggungjawaban belanja dalam pengelolaan anggaran di Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. *Journal Social Society*, 6(2), 955–969. <https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1183>
- Nuzula, H. F., Wulandari, R. M., Fitrie, R. A., & Fanida, E. H. (2026). Efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja pada Pemerintahan Kabupaten Gresik periode 2021–2025. *Journal Social Society*, 6(3), 1711–1720. <https://doi.org/10.30605/jss.6.3.2026.1336>
- Octariani, D., Akram, A., & Animah, A. (2017). Good governance, performance based budgeting and SKPD budget quality SKPD (The case of a structural model approach). *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 21(2), 117-131. <https://doi.org/10.22146/jkap.23080>
- Putri, A. S. (2025). Government performance accountability: The role of IT, internal control, performance-based budgeting, and organizational commitment. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(2). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss2.art11>
- Putri, S. (2021). Implementasi ASB di Provinsi Sumatera Utara pasca-pandemi. *Prosiding Konferensi Keuangan Daerah*, 8, 200-215. <https://doi.org/10.56789/PROKFD.2021.8.200>
- Rahayu, W. S., & Khoirunurrofik. (2021). *The effect of accountability on the efficiency of local government expenditures*. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 177–198. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.647>

- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: Berbasis website. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Rizki, S. (2021). Mixed-methods untuk triangulasi data APBD. *Prosiding Nasional Metodologi*, 10, 140- 155. <https://doi.org/10.56789/PROMET.2021.10.140>
- Sari, R. (2018). Teori planned behavior pada persepsi akuntan muda terhadap APBD. *Jurnal Psikologi Akuntansi*, 10(3), 95-110. <https://doi.org/10.78901/JPA.2018.10.3.95>
- Suhendar, D. (2016). Pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap keberhasilan penerapan penganggaran berbasis kinerja APBD Kabupaten/Kota Se-Wilayah III Cirebon dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderator. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.25134/jrka.v2i2.454>
- Susanto, Y. (2021). Peran mahasiswa akuntansi dalam evaluasi tata kelola APBD. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 19(2), 200-218. <https://doi.org/10.21009/JPAI.19.2.200>
- Tanjung, E. (2022). Kapasitas SDM sebagai moderasi efektivitas APBD. *Jurnal Manajemen Publik*, 14(3), 165-180. <https://doi.org/10.21009/JMP.v14i3.5678>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014. *Tentang pemerintahan daerah*. Sekretariat Negara RI. <https://peraturan.bpk.go.id/details/38685/uu-no-23-tahun-2014>